



SINERGI KEPEMIMPINAN DALAM MASA PANDEMIK: MENGHADAPI KRISIS MANAJEMEN DALAM KEBIJAKAN MENGATASI PANDEMIK COVID-19

Iwan Setiadi

Universitas Airlangga

iwan.setiadi-2018@fisip.unair.ac.id

Diterima:

30 Mei 2021

Direvisi:

9 Juni 2021

Disetujui:

14 Juni 2021

Abstrak

Pandemik Covid-19 mengakibatkan terjadinya krisis pengelolaan dalam kebijakan penanganan pandemik. Pengalaman Indonesia pada awal mewabahnya Covid-19 menunjukkan beban terberat adalah politisasi pandemik diantara aktor-aktor kunci dalam pemerintahan, di tengah terbatasnya sistem pelayanan kesehatan dan pengabaian penanganan pandemik di awal kemunculan kasus pertama di Indonesia. Tujuan penelitian ini sebagai bahan analisis dan pengetahuan tentang aspek kepemimpinan dalam penanganan awal pandemik. Analisa ini untuk menambah dan memperkaya wacana publik pada penanganan pandemik Covid-19 yang dilaksanakan oleh berbagai faktor, baik pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Analisa artikel ini bersifat sebagai kajian awal yang pandangan dalam menjajikannya bersifat reflektif. Oleh karena itu, analisis yang disajikan akan memberikan pemahaman dasar tentang dinamika penanganan pandemik di Indonesia. Menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan perspektif teori kepemimpinan politik dalam penerapan konsep fungsi eksekutif politik mengurangi penyebaran virus Covid-19, tulisan ini menyoroti bagaimana pandemik ini muncul ketika era kemajuan teknologi informasi dan berkembangnya kepemimpinan populisme. Perkembangan informasi saat ini mengharuskan keahlian komunikasi pemerintah lebih eksplisif terhadap masyarakat. Kurangnya suatu sistem yang lemah bentuk komunikasi pemerintah kepada publik yang nantinya berujung sampai meluasnya infodemik yang bahaya sama dari pandemik ini, keadaan yang seperti akan dapat mengurangi rasa percaya rakyat terhadap pemimpinnya. Kondisi krisis pandemik ini diperlukan keterlibatan masyarakat yang bersinergi dengan semua unsur pemerintah baik secara horizontal atau vertikal akan membuat syarat utama efektivitas dalam penanganannya, akan tetapi kebijakan ini tidak mudah di dalam sistem pemerintahan dan politik yang sifatnya desentralisasi dan plural. Serta secara politik keadaannya terfragmentasi, sinergi ini akan mengalami tantangan yang harus diatasi. Situasi ini menyebabkan perlunya kebijakan yang rasional dan jangka panjang dalam merespon pandemik agar tidak tergantikan dengan tindakan politik melalui kebijakan ini yang berkaitan

How to cite:

Setiadi, Iwan. (2021). Sinergi Kepemimpinan dalam Masa Pandemi: Menghadapi Krisis Manajemen dalam Kebijakan Mengatasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial dan Teknologi*

. 1(6): 451-464

E-ISSN:

2774-5155

Published by:

<https://greenvest.co.id/>

kepopuleran dalam jangka sedang untuk kepentingan memperkuat kekuasaan. Sehingga pandemi ini sebagai sarana memenuhi komoditas pemimpin secara pribadi ataupun komunitas yang mengorbankan pencegahan kondisi krisis kemanusiaan.

Kata kunci: *Kepemimpinan; Politisasi; Komunikasi; Sinergi; Kepercayaan Publik*

Abstract

The Covid-19 pandemic resulted in a management crisis in the policy of handling pandemics. Indonesia's experience at the beginning of the Outbreak of Covid-19 shows the heaviest burden is the politicization of pandemics among key actors in government, amidst the limited health care system and the neglect of pandemic handling at the beginning of the emergence of the first case in Indonesia. The purpose of this research as an analysis material and knowledge about aspects of leadership in the initial handling of the pandemic. This analysis is to add and enrich public discourse on the handling of the Covid-19 pandemic carried out by various actors, both central and local governments and communities. The analysis of this article is an initial study whose views in rationing it are reflective. Therefore, the analysis presented will provide a watershed understanding of the dynamics of pandemic management in Indonesia. Using descriptive-qualitative research with the perspective of political leadership theory in the application of the concept of political executive function to reduce the spread of the Covid-19 virus, this paper highlights how this pandemic emerged during the era of information technology advancement and the development of populism leadership. The current development of information requires that the government's communication skills be more exclusive to the public. The lack of a weak system of government communication to the public that will lead to the widespread information that is the same danger from this pandemic, such circumstances will be able to reduce people's trust in its leader. The condition of this pandemic crisis requires community involvement that synergizes with all elements of government either horizontally or vertically will make the main requirements of effectiveness in handling it, but this policy is not easy in a decentralized and plural system of government and politics. As well as being politically fragmented, this synergy will face challenges that must be overcome. This situation leads to the need for rational and long-term policies in responding to pandemics so that they are irreplaceable with political action through this policy relating to popularity in the medium term for the sake of strengthening power. So this pandemic as a means of fulfilling the communiqué of leaders personally or communities who sacrifice the prevention of humanitarian crisis conditions.

Keywords: *Leadership; Politicization; Communication; Synergy; Public Trust*

PENDAHULUAN

Pandemik Covid-19 menjadi isu kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia (Wua et al., 2021). Covid-19 yang merupakan pandemik global jelas menyebabkan kewaspadaan beragam kalangan, khususnya masyarakat (Jun et al., 2021). Pendemik Covid-19 merupakan kejadian yang mengejutkan dunia, yang menyebabkan disorientasi dan anomali masyarakat global. Ketakutan dari masyarakat akan semakin sangat terasa jika kita melihat terus bertambah (Sumandiyar & Nur, 2020) dan menyebarnya kasus ini yang secara cepat dan kurangnya kesiapan kebijakan beberapa elemen yang penting untuk mencegah penyebaran virus ini (Limbong et al., 2020). Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah agar segera mengambil aturan yang tepat (Ristyawati, 2020). Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19 (Ristyawati, 2020). Berbagai macam penanggulangan dan penanganan dilakukan, salah satunya *lockdown* untuk menekan penyebaran penyakit Covid-19 ini (Khoerunisa & Noorikhshan, 2021).

Belakangan wabah pandemik sudah terjadi lebih dari tujuh bulan sejak virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (Azmi, 2020). Dalam pencegahan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas (Abboah-Offei et al., 2021), para pimpinan di berbagai negara menerapkan kebijakan dengan cara melakukan *lockdown* (Valerisha & Putra, 2020), menetapkan pembatasan sosial dengan mengurangi kontak fisik atau *social distancing* seperti anjuran dari lembaga dunia disarankan oleh *World Health Organization* (WHO). Negara Indonesia menerapkan *lockdown* dengan memodifikasinya menjadi peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB (Soewardini et al., 2021). Di negara lain menerapkan kebijakan *lockdown* ini terbilang cukup efektif bila di laksanakan dengan konsisten (Firdaus & Pakpahan, 2020), secara perlahan namun pasti dapat mengontrol percepatan bertambahnya Covid-19 ini menyebar dengan ditunjukkan dengan penurunan kurva penyebaran virus.

Negara lain sudah menerapkan strategi kebijakan teknis yaitu *lockdown*. Penerapan *lockdown* ini diterapkan seperti di negara India dan Malaysia. Sedangkan di Indonesia tidak diterapkan dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Kebijakan teknis yang di pilih oleh pemerintah Republik Indonesia adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sejak pertama kali Badan Kesehatan Dunia telah menjelaskan bahwa wabah Covid-19 adalah sebagai pandemik. merespon lanjutan dari hal tersebut, pihak pemerintahan Indonesia telah membenarkan pandemik virus ini telah menjadi suatu bencana nasional. Presiden dengan pemerintah daerah dengan para staff jajarannya telah bekerja saling bahu membahu dalam membuat kebijakan aturan untuk mencegah menyebarnya Covid-19 ini di Indonesia. Pada pemerintah pusat melalui menteri hingga kepala daerah dari Provinsi, Kabupaten bahkan pemerintah desa.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita Covid-19 di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Kajian pertimbangan-pertimbangan sesuai keadaan negara Indonesia menerapkan kebijakan seperti pembatasan keluar rumah, tidak melakukan pembelajaran luring tetapi diubah ke metode pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah. Kebijakan yang muncul akibat pandemic Covid-19 dapat terlihat dengan adanya beberapa penutupan akses jalan dalam jangka waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi. Pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktivitas masyarakat keluar rumah.

Pada dasarnya pemerintah tidak akan dapat menghindari kematian akibat Covid-19 dan dampak ekonomi dari penyebaran virus ini tetapi, pemerintah harus mempunyai kewajiban agar memaksimalkan aktivitas menjaga rakyatnya dari pandemi ini kebijakan dan aturan yang telah dibuatnya. Berdasarkan kelembagaan, pemerintah mempunyai tugas untuk membuat aturan dan kebijakan. Maka dapat diketahui dari semua yang telah dikerjakan dan dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan publik. Sederhananya seperti ini, kebijakan publik adalah suatu kewenangan yang dimiliki serta dikerjakan oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik harus memaksimalkan secara efektif dan efisien mungkin usaha dalam menjaga masyarakat mengingat kebijakan ini kewenangan yang dibuatnya. Dititik inilah tulisan ini hadir untuk menganalisis nalar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan nalar yang digunakan masyarakat dalam merespon kebijakan publik. Momentum melakukan analisa dan pembenahan tata kelola klinis pada Covid-19 menjadi tantangan buat pemerintah menunjukkan eksistensinya terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 dengan ketidaksiannya juga telah membuat para pemimpin lembaga pendidikan gelagapan dalam memberikan respon. Awalnya pemimpin dalam beberapa level menganggap keadaan krisis suatu hal yang biasa, cenderung menganggap remeh, tercatat kemungkinan dari krisis serta dampak yang ditimbulkan. Setelah pemimpin menyadari ada dampak dalam kondisi krisis mereka baru mulai merespon. Namun mereka tidak merespon dalam keadaan yang sudah siap, yaitu telah memiliki rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang paling penting untuk menghadapi kondisi krisis kesehatan ini menurut Arnold M. dan Herman B. yaitu para pimpinan tertinggi agar memahami telah terjadi krisis besar yang terjadi. Kemungkinan adalah suatu langkah yang sulit, apalagi pada awal kondisi krisis.

Peran strategis seorang pemimpin dibutuhkan dalam situasi krisis dengan menjalankan kebijakan di saat situasi krisis kesehatan saat ini yang berbeda dari suatu manajemen risiko dari melibatkan potensi penilaian terhadap ancaman dengan mendapatkan suatu cara yang terbaik dalam mencegah ancaman risiko yang terjadi, manajemen krisis ini berkaitan dengan akibat dari, selama, sebelum serta setelah kejadian. Hal ini adalah suatu disiplin dalam aturan suatu kebijakan yang kontekstual secara luas yang mana terdiri dari teknik keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami, menilai, mengidentifikasi, mengatasi secara serius dan sejak kejadian pertama kali hingga pada proses pemulihan. Yang dibutuhkan oleh para pemimpin dalam kondisi krisis bukan hanya rencana atau respon yang dilakukan sebelumnya namun perilaku serta pola pemikiran dalam mengatasi mereka yang beraksi secara berlebihan terhadap masa lalu dan membantu mereka dalam melihat masa yang akan datang.

Artikel ilmiah ini memiliki tujuan dalam menyelidiki reaksi apa sajakah yang dilakukan para pimpinan dalam negeri dalam usaha mencegah menyebarnya Covid-19 serta sebagai mempertimbangkan peran baru dalam menghadapi konsekuensi pandemi Covid-19.

Pada artikel ilmiah ini, kami membahas tentang beberapa materi mengenai dampak pemerintahan menghadapi wabah Covid-19 ini. berdasarkan literatur dan studi kasus dari konteks internasional dan domestik. Pemahaman literatur ini kami lihat dapat digunakan untuk bahan mengevaluasi bagi pemerintahan mengenai kompetensi yang wajib dimiliki oleh para pimpinan dalam menghadapi suatu kondisi krisis. Pada keadaan setelah ini kami mengeksplorasi kebutuhan kepemimpinan transformasional.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penulisan artikel ini menggunakan metode dengan kualitatif dikarenakan pendekatan ini mempunyai kelebihan akan kemampuannya dalam pemahaman yang lebih mendalam, asli atau autentik, serta mendalami fenomena mendasar yang sedang diamati. Pendekatan metode yang dipakai adalah deskriptif analitis digunakan karena alasan informasi dan data yang dikumpulkan menfokuskan pada masalah aktual atau fenomena dengan proses penyusunan, pengumpulan data, mengolah data serta menarik kesimpulan. Hasil semua dari itu berupaya dalam mendeskripsikan kondisi yang bersifat empiris dan objektif atas fenomena keadaan masalah yang sedang diamati .untuk teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah memakai studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan di berbagai negara dalam situasi krisis memang tidak bisa ditangani secara mudah. Terlebih dalam pandemik Covid 19, dinamika krisis berlangsung sangat cepat dan membutuhkan *assesment* yang bersifat konsisten dari hari ke hari (Florentina et al., 2020), mengingat karakter bencana yang disebabkan pandemik ini (Lestari et al., 2020). Situasi krisis juga dengan mudah memicu adanya ketegangan dan konflik (Muhtadi, 2019), baik antar aktor pemerintahan maupun di setuju masyarakat. Di antara aktor pemerintahan, potensi konflik muncul sebagai akibat dari kontestasi kepentingan dan kewenangan, mengingat setiap aktor memiliki kepentingan yang diperjuangkan dan kewenangan yang bisa dijalankan secara formal. Keadaan situasi seperti ini, yang sangat dibutuhkan adalah kepemimpinan dan kelembagaan pengelolaan. Krisis yang kuat dengan demikian berbagai lembaga dan kepentingan sektoral bisa berada di bawah satu kepemimpinan dan kebijakan yang tunggal.

Langkah pemerintah Indonesia sebagai respon awal adalah kebijakan *social distancing* (selanjutnya definisi ini diubah oleh WHO sebagai *pysical distancing*). Arahan Presiden Joko Widodo, tanggal 17 Maret 2020 adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar kepada penyebaran Covid-19. Hal ini dipertegas dengan imbauan *bodily distancing* dalam skala yang lebih luas. Upaya untuk pencegahan penyebaran ini selanjutnya diperjelas dengan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19. Kebijakan inilah dirangkum yang kemudian diterjemahkan dengan tagar *hastage* viral: #StayHome, #WorkFromHome, #TetapDiRumah dan #DiRumahAja. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar tetap dipertahankan, baik itu urusan mengenai pelayanan kesehatan, kebutuhan pokok dan layanan-layanan publik lainnya. Lain halnya dengan transportasi publik.harus tetap disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan cara yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan tingkat kebersihan moda-moda transportasi yang digunakan serta disesuaikan dengan protokol .

Pelaksanaan beberapa kebijakan pemerintah yaitu dengan membentuk satuan gugus tugas Covid-19, pemerintah Indonesia tampak telah berusaha keras melalui Satgas Covid 19 ini dikarenakan kesiapan untuk menghadapi bencana dari aspek infrastruktur maupun sumber daya ini ikut menjadi hambatan dalam kesiagaan menghadapi masa pandemik. Koordinasi antara lembaga baik di tingkat level pusat ataupun daerah menjadi persoalan yang cukup serius, pada aspek non bencana sekalipun. Presiden RI telah menginstruksikan agar kebijakan yang mencakup nasional terkait dengan Covid-19 perlu adanya koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintahan pusat. Agar komunikasi

dipermudah maka daerah harus berkonsultasi dengan pihak kementerian yang terkait dengan Satgas Covid-19.

Poin penting dalam meminimalisir penyebaran virus ini tentunya dengan koordinasi yang baik antara institusi atau lembaga yang memiliki tanggung jawab penyelesaian masalah pandemik ini. Kunci utama dalam penyelesaian konflik terkait dengan Covid-19 ini adalah koordinasi. Sistem koordinasi ini dalam perkembangannya harus direfleksikan kedalam jumlah beberapa langkah yang strategis, walaupun dalam melaksanakannya masih memiliki kekurangan. Refleksi dari langkah-langkah dengan dimulainya suatu koordinasi antara institusi, lembaga, aktor dalam lembaga pemerintahan ditunjukkan dalam bentuk kebijakan merealokasi anggaran lembaga kementerian, impor alat kesehatan, perubahan pendapatan asli daerah, dana kas daerah, serta menetapkan Wisma Atlet Jakarta untuk rumah sakit darurat Covid-19 dan menyiapkan langkah dariantisipasi dari dampak yang terjadi selanjutnya.

Meskipun kebijakan dan peraturan telah dibuat dan diimplementasikan, adanya pelanggaran terhadap penerapan prinsip *physical distancing* telah dilaksanakan di berbagai daerah. Ini tentunya menandakan bahwa suatu kebijakan apapun yang telah dibuat oleh pemerintah belum bisa dapat dipercaya dengan yakin oleh beberapa komponen masyarakat. Beredarnya informasi bersifat masif dan yang kurang terkendali tentang penyebaran Covid-19, kemudian adanya kegagalan pemerintah memangkas persebaran virus, hal ini menyebabkan kurang terjadinya perubahan perilaku dan sikap yang mendasari dari elemen masyarakat, selain sifat senang berkumpul dan pola pekerjaan mereka yang sering menghambat suatu langkah persuasif dalam menerapkan kebijakan jaga jarak. Dalam penyelesaian penyebaran virus yang telah dikategorikan menjadi ancaman bagi seluruh negeri, sejatinya memiliki keputusan tegas dan tepat sasaran. Diperlukannya kebijakan dimana seluruh unsur lembaga dari berbagai unsur sosial masyarakat yang bersifat mengikat, memaksa dan wajib dilaksanakan. Himbaun kebijakan jaga jarak menjadi suatu upaya yang persuasi, yang proses pelaksanaan berbasis pada kesadaran individu masing-masing. Lain hal daripada ini himbaun menjaga jarak menjadi pilihan pemerintah bukan suatu tanpa adanya risiko. Akibat dari adanya pembatasan dalam suatu kehidupan interaksi masyarakat ini dapat mengkhawatirkan mengurangi produksi dan jumlah distribusi kebutuhan barang-barang mendasar dan kegiatan-kegiatan ekonomi sehari-hari yang bernilai.

Tindakan pertama yang merupakan respon awal dari pemerintah pada bulan Februari sampai Maret tahun 2020 telah menjadi krisis yang menunjukkan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mempersiapkan terjadinya krisis akibat pandemik ini tidak berjalan dengan baik. Tata kelola penanganan krisis pandemik ini termanifestasi dalam kebijakan itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah yang memiliki kewenangan. Adanya suatu konflik kewenangan yang terjadi antar lembaga, hal ini ditandai teruma dengan tidak adanya sinkroniasi kebijakan penanganan pandemik antara pemerintah pusat dengan daerah. Kemudian yang terjadi adanya ketidakjelasan penanganan krisis Covid-19 dalam hal koordinasi. Penanganan pandemik ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah sering melakukan blunder dalam mengelola informasi, yaitu terutama terkait dengan ketidakselarasan informasi yang disampaikan oleh para pembuat kebijakan. Dengan informasi yang tidak akurat ini mengakibatkan masyarakat kurang mendapatkan informasi yang tepat dalam penanganan krisis pandemik ini. Refleksi dari temuan yang ada diatas dapat dilihat bahwa adanya ketidakmampuan pejabat dalam mengelola komunikasi dan informasi publik secara benar, transparan dan akurat di masa krisis pandemik.

Krisisnya aturan darurat Covid-19 serta dampaknya atas penanganan kebijakan yang terjadi di Indonesia, mencerminkan secara mendalam tentang lemahnya kapasitas

menghadapi krisis dari pemerintah, dengan bagaimana wabah ini menyebar dengan berbagai masalah yang kompleksitas. Pengalaman yang dialami dunia untuk menghadapi pandemik yang telah ada dan bersifat masifnya wabah ini, akan tetapi wabah Covid-19 ini banyak hal di dalamnya yang bersifat luar biasa. Skala penyerangannya yang masif, ancaman medis yang terjadi, serta akibat sosial ekonomi yang terjadi dalam skala nasional maupun internasional. Karena bersifat luar biasa, mengingat dari situasi ini belum terdapat literatur yang dapat menerangkan bagaimana negara termasuk juga Indonesia, krisis kebijakan ini menghantui dalam penanganan Covid-19 ini.

Untuk menghasilkan analisa situasi krisis ini yang akurat tentunya diperlukan pengetahuan serta keterampilan analitis kondisi krisis yang cukup memadai, kemudian politik kepemimpinan harus berani menanggung risiko yang diambil dengan waspada terhadap segala kemungkinan kejadian yang terjadi. Berhasilnya kebijakan krisis manajemen ini memerlukan urgensi, pemikiran strategis dan kreatif, kepastian untuk bersikap jujur dalam kegiatan, berani mengambil risiko untuk mencapai hal yang optimal dan waspada terhadap situasi krisis yang dinamikanya berubah dengan cepat.

Bentuk kebijakan dalam kondisi krisis yang terjadi ini, menjelaskan kebijakan krisis manajemen dalam penanganan Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang mungkin belum bisa menjelaskan sepenuhnya. Akan tetapi, meminjam kerangka di atas, krisis manajemen kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

Yang pertama, tidak adanya urgensi yang darurat ketika wabah Covid-19 ini menyebar, mulai dari Wuhan hingga menuju ke sejumlah negara pada berbagai belahan dunia manapun. Kondisi yang krisis ini menunjukkan lemahnya penanganan pada kondisi darurat. Pejabat publik Indonesia mengabaikan kemungkinan akan menyebar ke Indonesia dengan cepat sampai ke Indonesia. Pengabaian dari sikap pemerintah dengan tidak adanya diagnosa atas permasalahan krisis ini terjadi secara mungkin. Akhirnya, pengumuman kejadian kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020,antisipasi yang tidak ada apapun dianggap untuk keperluan dalam mencegah penyebaran virus di Indonesia tidak ada dilakukan. Kemudian negara Indonesia menghadapi cepat menyebarnya virus Covid-19 ini dengan tidak ada kesiapan dan kebijakan untuk mengatasi situasi yang krisis ini. Kurangnya fasilitas dasar dan kondisi tidak adanya panduan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan yang terlambat memperlihatkan ketidak siap siagaan pemerintah Indonesia.

Kedua, kurangnya ketidapercayaan akan ilmu pengetahuan yang menjadi fondasi peraturan di antara para pejabat publik. Kompilasi pengetahuan atas pandemik sejak kasus Covid-19 terjadi ini sudah terakumulasi, dari mulai tentang karakter virus ataupun praktik dari berbagai cara menangani virus ini dari beberapa negara. WHO, sebagai Badan Organisasi Internasional yang menangani kesehatan, telah mempublikasikan beberapa pedoman dan laporan untuk menangani virus ini. Prediksi secara spesifik pada penyebaran yang kemungkinannya terjadi pada bulan Februari 2020 lalu. Akan tetapi, hal yang mengejutkan adalah pejabat pemerintah memberi tanggapan yang malah mengabaikan analisis secara ilmiah dan pengetahuan yang telah terakumulasi di atas dan responnya bahkan dengan sikap cenderung menunjukkan kemarahan. Ketika infeksi virus belum ditemukan, para pemangku kepentingan yaitu pemerintah kepercayaan diri yang ditunjukkan dalam pernyataan yang digunakan tidak ada yang berbasis pada analisis keilmuan dan data pengetahuan yang relevan dengan wabah Covid-19 ini. Abainya terhadap data pengetahuan ilmiah ini memberi sumbangan yang sangat besar akibat munculnya penanganan kebijakan pandemi yang telah terlaksana.

Ketiga, pemerintah mengalami keraguan dalam memutuskan kebijakan dasar untuk mencegah tersebar Covid-19 ini. Keempat, tidak adanya koordinasi serta sinergi dari suatu peraturan pada waktu periode kondisi krisis. Terlepas bagaimana sistem atau

struktur pemerintahan serta kontestasi politik yang terjadi antar aktor, penanganan kebijakan situasi krisis Covid-19 memerlukan sinergi serta koordinasi yang kuat antar lembaga dan aktor dalam pemerintahan. Setidaknya antara pada akhir bulan Maret tahun 2020 lalu, koordinasi dengan sinergi yang menjadi kunci terhadap suksesnya penanganan kondisi krisis yang masih sangat lemah ini.

Krisis kebijakan yang terjadi ini memberikan dampak serius dalam penanganan pandemik yang efektif. Fakta penyebaran dapat terlihat pada penyebaran virus ini yang semakin meluas hingga keseluruhan wilayah yang ada di negara Indonesia, terus bertambahnya jumlah pasien positif secara signifikan setiap harinya. Keberhasilan yang menjadi ukuran dasar penanganan kebijakan pandemik adalah tidak ada tersebar secara lebih jelas dan berkurangnya secara fatalitas. Unsur pokok yang tidak terpenuhi menunjukkan kegagalan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Krisisnya manajemen kebijakan ini berdampak pada rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahan. Inisiatif yang kuat dari masyarakat dalam merespon situasi krisis dalam kondisi tertentu memang adanya solidaritas yang kuat dari berbagai kelompok, tetapi pada lain sisi menjadi bom waktu akan ketidakpercayaan atas ketidakpercayaan rakyat takan kepemimpinan dalam menangani pandemik ini dari pihak pemerintahan sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial. Apabila tidak terkelola dengan baik, maka kondisi krisis akibat Covid-19 ini dapat memicu terjadinya krisis kepemimpinan bahkan dapat juga terjadi krisis secara politik. Yang terakhir, apabila krisis kebijakan ini akan terus berlangsung, dengan dampak ekonomi sosial dan bahkan politik. Keadaannya akan membawa pada konsekuensi dalam pemulihan pada masa pasca krisis yang tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta pembiayaan yang juga tidak sedikit.

Covid-19 menjadi permasalahan yang dihadapi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengumuman resmi pemerintah tentang pasien pertama yang terinfeksi Covid-19. Beberapa hari kemudian, pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota secara gamblang mengeluarkan beberapa inisiatif dalam merespons pandemik Covid-19. Sejumlah daerah menutup sebagian akses masuk dan keluar ke wilayahnya baik akses melalui darat, laut, bahkan udara. Tentu dalam skema distribusi kekuasaan pusat daerah sejak lebih dari satu dekade ini bisa saja dijelaskan dengan norma konstitusi yang paling sederhana yaitu pemikiran dekonsentrasi di level provinsi dan desentralisasi bagi kabupaten atau kota.

Bentuk komunikasi dari kebijakan publik yang dibentuk oleh para kepala daerah ini tentunya berbeda respon dalam menghadapi pandemik Covid-19 di daerah masing-masing. Hal pertama dalam meletakkan upaya kebijakan dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, pemerintahan daerah sebagai suatu lembaga institusi negara yang memiliki relasi dengan berbagai institusi lain entah itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetangganya. Konsep kepemimpinan seperti ini menjadi suatu pintu masuk dalam bekerjanya fondasi yang normatif dalam kewenangan kepala daerah yang sudah diatur dalam kelembagaan negara. Kepemimpinan menjadi pembahasan yang penting dalam memahami kepada daerah atas respon yang berberda-beda antara lembaga satu dengan lembaga lainnya dalam menangan Covid-19 ini.

Tipe kepemimpinan dan model kelembagaan sudah bekerja pada akhirnya memiliki suatu implikasi pada sumber daya yang ada pada pemerintah yang terdistribusikan di daerah dalam kondisi yang krisis. Karakteristik dan sifat pandemik dari Covid-19 pada sisi lain menjadi sebuah krisis yang baru terjadi di Indonesia. Penyakit menular menjadi kondisi krisis masif ini seperti bukan kegagalan yang di alami akibat dari ulah manusia, misalnya kebakaran atau kecelakaan maupun bencana lainnya yang diakibatkan secara alamiah contohnya banjir dimana wilayah administrasi yang jelas dan

lokasinya jelas terlihat. Sebagai negara kesatuan, sistem dan struktur dari kelembagaan di Indonesia terdapat beberapa tingkatan hirarkis sebagai lembaga negara dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa atau kelurahan. Beberapa daerah menerapkan unit kelurahan atau desa memiliki variasi berbeda dalam menetapkan sumber daya hingga sampai pada institusi tingkat desa dan kelurahan.

Implikasi model kelembagaan pada versi kepemimpinan sedikit memberi pengaruh di setiap daerah kerja administrasi. Konteks politik kepemimpinan klasik yang masih relevan sekarang ini yaitu identifikasi aspek penjelasan kepemimpinan, yaitu kekuatan asal-usul pemimpin, usaha yang dilaksanakan para pemimpin, kelembagaan pembantu para pemimpin beserta instrumennya, lingkungan karakteristik di dalam otoritas dijelankannya. Jika menderivasi ini disetujui secara privat, maka ada beberapa komponen privat yang dapat menilai kondisi politik kepemimpinan (Brouer et al., 2016). Secara singkatnya adalah suatu kemampuan dalam melihat atau membaca kondisi dari lingkungan, kemampuan tata kelola jaringan, mampu memengaruhi pihak lain, serta memiliki kapasitas untuk berbuat jujur dan tulus. Keadaan kondisi krisis yang kompleks dan karakteristik krisis yang bermacam-macam pada pandemik ini hingga melewati batas lintas sosial, lintas wilayah dan melihat perilaku yang dibutuhkan manusia.

Meskipun demikian ekspektasi mengingatkan bahwa dengan lebih dikenali para pemimpin apabila meletakkan keselamatan warganya sebagai yang utama, dari riset penelitian yang menunjukkan bahwa para pemimpin publik malah mempertimbangkan biaya politik daripada kepentingan ekonomi kesejahteraan masyarakat dalam membuat penetapan kebijakan. Kepala daerah yang ada di Indonesia ketika menghadapi situasi kondisi krisis dalam pembuatan kebijakan dari konteks tingkatan kelembagaan menggunakan perspektif kepemimpinan. Yang pertama pertimbangan keputusan politik dari para kepala daerah serta ketertiban suatu administrasi kebijakan dalam menentukan aturan yang akan di keluarkan perlu sebuah eksplorasi.

Beberapa pemerintah provinsi sebagian sudah mendeklarasikan secara tegas dimana batas wilayah administrasi mereka dengan menutup akses keluar dan masuk, mereka membuat kebijakan ini tanpa ada perintah dari pemerintahan pusat. Perilaku normatif ini memiliki pemikiran yang terdekonsentrasi. Ketika pemerintah provinsi maupun pusat dan dilain pihak yaitu pemerintah kabupaten atau kota mereka tidak banyak yang menunggu perintah dari pusat. Dengan prinsip desentralisasi dimana pemerintah memiliki kekuasaan otonomi daerah yang memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur daerahnya. Sehingga pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dapat memiliki intervensi dan inisiatif sendiri untuk merespon kebijakan mencegah virus Covid-19.

Terdapat dua versi peraturan kebijakan yang sangat universal dan menjadi sangat krusial dalam mendiskusikan perihal kepemimpinan dan sistem kelembagaan pimpinan kepala daerah. Kejadian sepanjang bulan Maret 2020 terdapat respon yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah dari wilayah provinsi ataupun kabupaten dan kota. Respon pertama sesuatu yang paling sering muncul dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota dengan melakukan penutupan akses ke daerah lain. Pada tingkatan daerah provinsi menutup akses berbagai jalur transportasi darat dari batas provinsi, laut dengan pelabuhannya, ataupun udara yaitu di bandar udara sebagian telah menutup aksesnya atau mengurangi penerbangan mereka. Sedangkan penutupan akses di daerah kabupaten atau kota mereka membangun pembatas pada areal wilayah administrasinya untuk mendirikan pos pengecakan masyarakat yang akan keluar masuk wilayah. Yang kedua, penutupan pelayanan kantor administrasi dalam jangkauan pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Mereka membatasi sistem kerja mereka dengan memberlakukan kegiatan belajar serta bekerja dari rumah.

Sesuatu yang perlu disadari respon kepala daerah yang dikeluarkan sebelum pemerintah pusat membuat kebijakan bahwa pembatasan sosial dalam skala besar yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden pada bulan April 2020. Pemerintah Pusat yang sudah diketahui yang praktis baru saja hadir pada akhir bulan Maret saat presiden mengeluarkan aturan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan disaat yang sama membuat Keputusan Presiden Nomor 11/2020 tentang Penetapan darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19. Pemerintah pusat secara singkatnya telah melakukan karantina secara wilayah provinsi saat periode bulan Maret tetapi ada banyak pimpinan daerah bahkan menetapkan untuk memilih karantina ataupun *lockdown* untuk aturan menutup akses keluar masuk daerah lain serta menutup lembaga publik terutama institusi pendidikan. Yang artinya, pemerintah pada level provinsi ataupun kabupaten dan kota mereka memilih keputusan sendiri dalam memberlakukan kebijakan ini.

Dalam keadaan krisis, bahwa pelatihan pada tingkat otonomi di level provinsi dapat dipelajari oleh kepala daerah, kewenangan yang bersifat pasif dalam aturan kebijakan dengan tingkat fleksibilitas yang mengalami kelonggaran sangat beragam. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi lebih taat kepada keputusan dari pusat kita bayangkan dalam sistem dekonsentrasi memiliki cara kerjanya sendiri yang mana kewenangannya ada batas wilayah yang kasat mata, seperti contohnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Pimpinan Daerah dapat dibayangkan memiliki otonomi yang lebih luas, kondisi krisis yang seperti ini memiliki intervensi dari pemerintahan provinsi, yang dapat kita lihat pada kondisi yang terjadi pada walikota Tegal atas karantina wilayah mendapat respon Gubernur Jawa Tengah. Adanya respon kebijakan diberbagai daerah itu dari provinsi ataupun kabupaten terhadap kebijakan yang dibuat ini menjelaskan bahwa tingkat krisis pada pandemik ini dapat dilihat dengan jumlah pasien positif yang ada di daerah tersebut yang mana ini tidak menjelaskan krisis manajemen kepala daerah.

Surakarta merupakan kota pertama yang mempublikasikan peraturan tegas dalam mengatasi krisis pandemik Covid-19. Walikota Solo F.X Hadi Rudyatmo menetapkan Solo dalam keadaan status Kejadian Luar Biasa. Setelah kejadian seorang warga meninggal dunia kemudian menyatakan terkontaminasi positif Covid-19 ditetapkan kan Solo menjadi status Kejadian luar biasa ini. Setelah penetapan Kejadian Luar Biasa ini dilanjutkan dengan menutup tempat destinasi wisata, menutup kegiatan sekolah, pembatasan kunjungan kerja serta dan lainnya. Dalam kesempatan wawancara dengan media, Walikota Hadi menyataka “Mau dibilang *lockdown* boleh, kalau dilaksanakan salah, tidak dilakukan juga salah, saya disalahkan orang waras (sehat) daripada disalahkan.

Secara formal dengan memakai istilah kejadian luar biasa, meski bukan dengan cara *lockdown* (Nur & Marzuki, 2020), walikota Hadi dengan aturan kebijakannya ini menjelaskan secara tegas sikapnya dengan cepat dalam kondisi krisis ini. Komunikasi aturan kebijakan ini di informasikan melalui akun media sosial dari pemerintah kota Solo (contonya aku IG @pembkotsurakarta), peratuan kebijakan walikota Solo ini dengan cepat menjadi kebijakan yang populer pada saat pemerintahan pusat belum menentukan sikap terhadap kasus yang melanda di Solo maupun Indonesia.

Ketika Solo menetapkan kejadian luar biasa, berbeda dengan kota Tegal yang melakukan untuk menerapkan peraturan *lockdown* melalui walikota Tegal Dedy Supriyono pada tanggal 25 Maret 2020, dikarenakan kota Tegal menjadi daerah yang siaga darurat menjadi daerah dengan zona merah kasus pasien terinfeksi Covid 19. Dalam sebuah konferensi pers media, walikota Tegal menerangkan kebijakan dalam menutup akses keluar masuk kota dengan beton ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam

mengurangi penyebaran virus. kebijakan ini di mulai pada 30 Maret hingga 30 Juli 2020. Sikap dari walikota ini menjelaskan sebuah ketegasan tanpa menunggu perintah dari pemerintah pusat ataupun provinsi. Untuk bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kota Tegal, dengan mempersiapkan metode bantuan tersendiri bagi warga yang mempunyai penghasilan rendah. Aturan ini ditetapkan, setelah satu orang positif Covid-19 dan satu orang PDP meninggal dunia di kota Tegal.

Keputusan melakukan *lockdown* dari walikota Tegal ini membuat perhatian langsung dari Gubernur dan Pemerintah Pusat. Sejak tiga hari penetapan *lockdown*, Walikota Dedy mengganti istilah resmi mereka dari *lockdown* ke dalam sebutan isolasi wilayah. Arahan berubahnya ini berasal dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Yang mana kebijaka terkait dengan *lockdown* pimpinan daerah dari tingkat kabupaten maupun kota untuk menyelaraskan kebijakan dari pemerintah pusat dalam meningkat sosialisasi tentang *physical distancing*. Dengan lebih jelas lagi, bahwa isolasi daerah ini untuk membatasi akses pada jalan masuk ke kota Tegal. Adanya suatu intervensi dari gubernur dalam kondisi ini menjelasakn bahwa Ganjar sebagai pimpinan daerah provinsi memberitahukan bahwa kota tegal masih wilayah yang menjadi kawasan Jawa Tengah yang berada dibawah kendali Gubernur Jawa Tengah.

.Kejadian berbeda terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 16 Maret 2020, daerah wisata dalam kawasan Yogyakarta masih tetap buka walaupun satu orang telah terkonfirmasi positif Covid-19. Keputusan ini di ambil adalah yang dipilih oleh pemerintah Yogyakarta lebih mengutamakan lingkungan yang bersih serta menerapkan kebijakan *slow down* dan *calm down*. Sejak kasus pertama positif Covid-19, pemerintah melalui Gubernur DIY , Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 23 Maret 2020 yaitu kebijakan yang telah dipilih hanya untuk meredam penyebaran virus saja, namun beberapa pihak menginginkan agar Yogyakarta untuk di *lockdown* saja. Sementara untuk daerah lain, aturan *lockdown* ini belum dapat diterapkan karena adanya ketidak cocokan dengan aturan pemerintah pusat.

Berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Kalbar, pimpinan provinsi melalui gubernur Sutarmidji mempunyai penalaran beda dalam memberikan penjelasan terhadap kuasanya pada wilayah di tengah kondisi pandemik. Pada 15 Maret melalui konferensi persnya menyatakan bahwa, “Masyarakat Kalimantan Barat silahkan terbang ke mana saja, akan tetapi jangan pulang kondisi ini mengungkapkan bahwa himbauan untuk masyarakat agar mereka jangan bepergian ke luar negeri diabaikan warganya. Sejak saat itu di sampaikanlah bahwa satu orang pasien yang telah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso, Kota Pontianak dinyatakan positif Covid-19, dan duga tertular virus saat pergi keluar negeri. Dengan pernyataan persnya, Gubernur menjelaskan suatu kepemimpinan yang berani dan tegas sekaligus sedikit mengancam. Kebijakan gubernur ini pada prakteknya tidak hanya melarang masyarakatnya untuk pulang dari luar negeri, akan tetapi hanya diberlakukan karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri.

Peraturan lain ke masyarakat yang diterapkan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apabila sebelumnya kebijakan .di.Jakarta menerapkanaturankarantina wilayah yang sifatnya masih himbauan, PSBB ini mempunyai aturan lebih ketat karena ada aturan melalui Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur ini mengarahkan segala aturan hal terkait aktivitas yang ada di Jakarta, seperti aktivitas keagamaan, perekonomian budaya, sosial, hingga pendidikan. Kebijakan dari gubernur ini juga berlaku bagi semua warga Jakarta (terkecuali mereka yang bekerja pada sektor yang dikecualikan), agar tetap tinggal di rumah dan mengurangi kegiatan yang ada di luar rumah paling lama selama dua minggu. Aturan kebijakan ini diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies untuk menjelaskan

bahwa kendali penuh yang mengatur masyarakat Jakarta tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat.

Kebijakan dari para kepala daerah baik Gubernur atau Bupati/Walikota yang sampai ke masyarakat melalui media di tengah penghapusan pembatasan sosial menjelaskan suatu kecenderungan bahwa kepala daerah tetap menjadi sorotan utama. Hal ini dipahami dengan baik oleh beberapa kepala daerah untuk meningkatkan citra diri dengan gaya kepemimpinannya yang khas. Ada beberapa media yang misalnya berusaha untuk mengangkat wacana tentang kepala-kepala daerah yang dianggap berhasil dalam merespons pandemik virus Covid-19 ini. Administrasi Jawa Barat di bawah pimpinan Ridwan Kamil misalnya, dinyatakan kurang berhasil dalam membangun komitmen masyarakat dan transparansi. Dalam sistem kelembagaan dan potret. Dari komunikasi publik kepala daerah ini menunjukkan bagaimana peran actor komunikasi publik dalam kelembagaan pemerintah daerah seperti hubungan masyarakat (humas) sangat bergantung pada sosok individu yaitu pimpinan. Sedangkan dalam saluran media, komunikasi publik kepala daerah masih bergantung tinggi pada media masa siaran pers daripada peningkatan pada saluran media sendiri seperti media sosial.

Kondisi lingkungan bumi krisis akibat pandemik memerlukan pengambilan kebijakan dan mengimplementasinya dengan segera. Sisman, M.Turan, S menyatakan bahwa manajemen krisis ini memberikan sesuatu yang dibutuhkan pemimpin yang mempunyai visi. Pemimpin visioner memiliki pandangan yang mengarah pada visi ke masa yang akan datang, memotivasi bawahan untuk mewujudkan kebijakan untuk menekan kasus pandemik ini dan identifikasi visi dan tujuan yang realistis untuk masa depan organisasi pemimpin yang mana memiliki pandangan jauh ke depan serta yang memiliki visi dapat memotivasi potensi staf mereka dengan baik dan meyakinkan bahwa mereka dapat melakukan kebijakan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Beban signifikan terkait dengan manajemen yang krisis adalah kenyataan bahwa beberapa pemimpin lebih suka berpegang pada aturan kebijakan. Karena mereka ingin melihat semua tindakan dan operasi mereka dinyatakan sesuai dalam Undang-Undang mereka tidak dapat mengambil keputusan segera dalam peristiwa yang tidak terduga. Ini memengaruhi manajemen organisasi secara negatif. Dengan demikian, pimpinan yang mempunyai visi segera bertindak setelah memahami indikator krisis dan memandu anggota dan tim.

Masa pandemik yang terus berlangsung sejak saat ini mengakibatkan kenaikan jumlah korban positif Covid-19, sehingga muncul berbagai respon dari banyak kota di dunia dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang berhubungan dengan penanganan pandemik Covid-19 di daerah masing-masing. Di saat kondisi pandemik sekarang ini, orang pertama yang dijadikan harapan bagi publik adalah seorang pemimpin. Sosok pemimpin yang diharapkan bisa mengetahui bagaimana mengambil keputusan tepat dalam penyelesaian masalah pandemik sedang dialami.

Masa krisis pandemik seperti ini, para pemimpin sebenarnya berkesempatan untuk meningkatkan kelayakannya sebagai pemimpin dalam menghadapi kondisi krisis yang sedang berlangsung. Hal tersebut dikarenakan dalam menghadapi pandemik ini, pemimpin akan dihadapkan oleh banyak tekanan dari berbagai pihak, sehingga pimpinan melaksanakan kebijakan yang memberikan pengaruh mau tidak mau di asah kemampuannya dalam menghadapi hal-hal situasi krisis saat ini. Mereka di harapkan mengeluarkan kebijakan yang tepat agar dapat mengurangi jumlah angka jumlah pasien positif Covid-19 ini.

Penanganan pandemic dari sisi pemerintah lemahnya komunikasi dan koordinasi yang semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadapi infeksi virus yang tidak terlihat ini. Bukan hanya soal konsistensi dalam

pernyataan, tetapi juga telah terjadi tumpang tindih informasi dalam pemberlakuan kebijakan *lockdown* di tingkat daerah walaupun Presiden menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.

Para pemimpin pada kondisi krisis seperti harus mampu mengambil keputusan, serta mengoperasikan tindakan dalam bentuk kebijakan yang mereka buat. Dalam keadaan krisis seperti ini orang tentunya membutuhkan pemimpin yang kuat, percaya diri dan mudah diajak komunikasi. Para pemimpin harus mampu mereka harus dapat merestrukturisasi organisasi dan mengadopsinya dengan keadaan lingkungan yang berubah, serta mengatasi keadaan krisis di mana terdapat lingkungan mereka terjadi kekacauan dalam organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa, pemimpin memiliki peran yang penting dalam kondisi saat ini. Dengan demikian, perlu mempelajari karakteristik seorang pemimpin dalam manajemen menghadapi pandemik saat ini. Dari kasus Covid-19, akan terlihat siapa pemimpin yang berkompeten dan siapa yang tidak berkompeten.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis aturan dan kebijakan dalam penanganan pandemik Covid-19, pada saat awal munculnya kasus. Awal tidak adanya respon cepat untuk mempersiapkan diri sebagai masa awal tanggap darurat menghadapi pandemi. Dengan melihat kerangka pemikiran analisis (Farazmand, 2001) krisisnya kepemimpinan yang lemah, tidak adanya kebijakan yang dominan, kurangnya koordinasi dan sinergi antar aktor administrasi, krisis aturan dan kebijakan ini dapat terindikasi dari kuatnya sikap pengabaian seorang pejabat publik atas ancaman dari pandemic ini, serta munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejumlah perbaikan memang telah dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan untuk mengelola krisis secara lebih baik, namun kegagalan dalam respons awal telah menjadikan penanganan pandemik Covid-19 akan menjadi lebih sulit. Serta seiring dengan mulai munculnya dampak-dampak sosial-ekonomi yang memperburuk kehidupan warga negara, beberapa langkah perbaikan kebijakan yang bersifat mendasar sangat perlu dilakukan. Sebagaimana yang telah terjadi dibanyak kondisi krisis, kegagalan kebijakan dalam pengelolaan krisis dan dampak yang ditimbulkannya bukan hanya berujung pada hilangnya legitimasi kepemimpinan politik.

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas terdapat beberapa hal bersifat taktis untuk jangka pendek atau secara strategis jangka panjang dapat digunakan sebagai rekomendasi suatu kebijakan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat secara umum. Pertama, untuk pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten dan kota untuk segera melembagakan kolaborasi antar daerah seperti Forkompimda yang dipimpin oleh pemerintah provinsi sebagai penengah. Pelembagaan pada level provinsi yang dipimpin langsung pemerintah pusat juga penting sehingga menciptakan interkoneksi penduduk dan mobilitas warga dapat terkelola dengan baik.

Kedua, selain dengan desain kelembagaan pada titik krusial sebagai koordinasi lintas yurisdiksi di atas, peraturan dalam paket kebijakan dan keputusan politik yang berbasis informasi menjadi penting dalam bentuk kepemimpinan di daerah. Kemajuan suatu teknologi yang mampu menangkap preferensi spesifik perihal masalah valensi seperti keamanan dan kesehatan, misalnya melalui *large information investigation* (investigasi secara besar-besaran), penting sebagai upaya mengakselerasi mekanisme *base up* (mendasar) dalam hitungan menit. Pelatihan atas informasi menjadi pintu masuk dalam memastikan apakah retorika kebijakan yang disampaikan oleh kepala daerah benar-benar merepresentasikan substansi kebijakan yang sesungguhnya.

BIBLIOGRAPHY

- Abboah-Offei, M., Salifu, Y., Adewale, B., Bayuo, J., Ofosu-Poku, R., & Opare-Lokko, E. B. A. (2021). A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 3, 100013. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2020.100013>
- Azmi, M. (2020). Covid-19, Media Sosial dan Moderasi Beragama di Indonesia. In *Kampus Merdeka Seri 1: Menilik Kesiapan Teknologi Dalam Sistem Kampus*. Syiah Kuala University Press.
- Brouer, R. L., Chiu, C.-Y. C., & Wang, L. (2016). Political skill dimensions and transformational leadership in China. *Journal of Managerial Psychology*, 31(6), 1040–1056.
- Farazmand, A. (2001). *Handbook of crisis and emergency management*. CRC Press.
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219.
- Florentina, I. E., Wibowo, A. J., Hoesodo, T. S. B., Murti, S., & Tangkas, A. (2020). *Media, Komunikasi dan Krisis Covid-19*. Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Jun, S.-P., Yoo, H. S., & Lee, J.-S. (2021). The impact of the pandemic declaration on public awareness and behavior: Focusing on COVID-19 google searches. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120592. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120592>
- Khoerunisa, N., & Noorikhshan, F. F. (2021). Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India. *Journal of Political Issues*, 2(2), 89–101.
- Lestari, Y., Pairin, U., & Hasan, L. N. (2020). Pengembangan Handmade Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gresik Menghadapi Pandemi Covid-19. *SOEROPATI*, 3(1), 27–38.
- Limbong, M., Ali, S., Rabbani, R., & Syafitri, E. (2020). Pola Interaksi Guru dan Orang Tua dalam Mengendalikan Emosional Siswa Selama Pembelajaran Daring di MTs Islamiyah Medan. *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 44–55.
- Muhtadi, A. S. (2019). Komunikasi Lintas Agama: Mencari Solusi Konflik Agama. *Conference Proceeding ICONIMAD*, 275.
- Nur, M. I., & Marzuki, I. (2020). Evaluasi Pendidikan Nasional Era Pandemi Bersandar Pada Chaos Theory. *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy*, 2(2).
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–249.
- Soewardini, H. M. D., Lestari, R., Chamidah, D., Tya, F. W. R., Giri, K. R. P., Ramadhana, N., Andriyani, W., Suprayitno, A., Mardani, D. A., & Mochdar, D. F. (2021). *Kajian Lintas Perspektif Ilmu Tentang Pandemi Covid-19*. Penerbit Qiara Media.
- Sumandiyar, A., & Nur, H. (2020). Membangun Hubungan Sosial Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Makassar. *Prosiding Nasional Covid-19*, 74–81.
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 131–137.
- Wua, C. J., Sambiran, S., & Lopian, M. T. (2021). Kepemimpinan Hukum Tua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimasa Pandemi Covid-19 (Suatu Studi di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

